

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memasuki era pergeseran orientasi pemerintahan dari *commad and control* menjadi orientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik yang kemudian membentuk suatu otonomi daerah.<sup>2</sup> Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, hal tersebut tentunya akan memacu daerah dalam mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.<sup>3</sup> Dalam UU No 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan daerah masing-masing.

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat utama. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009)

<sup>3</sup> Saputri, Sealys Harie, *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Hal.1

anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten/kota.<sup>4</sup> Fenomena yang terjadi saat ini, Bupati Kabupaten Tulungagung meminta kepada DPRD Tulungagung untuk melakukan pengesahan dan segera menyelesaikan pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun 2023 sebelum berakhir masa jabatannya. Sedangkan terkait rencana anggaran setelah dilakukan perubahan APBD Tulungagung tahun 2023, akan terjadi penambahan anggaran belanja dan membuat anggaran belanja naik menjadi Rp 3,095 triliun dari yang sebelumnya Rp 2,735 triliun. Begitu pun di sisi rencana pendapatan juga bertambah Rp 73,084 miliar, dari yang sebelumnya sebesar Rp 2,575 triliun menjadi Rp 2,648 triliun. Terkait adanya penambahan APBD perlunya mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendapatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanja daerah di Kabupaten Tulungagung pada periode tahun sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kakung menganalisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah pada Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2017. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Kabupaten Tulungagung mampu memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah akan tetapi masih bergantung kepada pemerintah pusat pada penerimaan pendapatan daerah. kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki masalah pada manajemen keuangan dan

---

<sup>4</sup> Rini Oktriniatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi .... pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: Tesis Program Studi Magister Manajemen, 2011), Hal. 2

kesinambungan fiscal daerah yang tidak lancar. Kinerja pendapatan daerah yang besar masih kurang dapat memaksimalkan belanja daerah karena pada belanja langsung dan belanja tidak langsung masih kurang memaksimalkan belanja langsung yang berkaitan dengan aktivitas Pemerintah Kabupaten Tulungagung.<sup>5</sup>

Perbedaan antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode penelitian yang berbeda. Periode penelitian merujuk pada rentang waktu di mana penelitian dilakukan, yang mencakup tahun-tahun tertentu dimana diambil dari periode yang relevan dengan subjek penelitian. Jika penelitian ini dilakukan dalam periode waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya, maka kemungkinan besar ada perubahan dalam konteks, situasi, atau kondisi yang memengaruhi subjek penelitian. Ini bisa menjadi hal-hal seperti perubahan dalam kebijakan, teknologi baru, tren sosial, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi temuan penelitian. Jadi, perbedaan terletak pada rentang waktu di mana penelitian dilakukan, yang dapat memengaruhi hasil dan kesimpulan yang ditarik dari penelitian tersebut dengan menggunakan metode analisis yang sama yaitu analisis rasio kinerja.

Kinerja dari sebuah pemerintahan menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat dan diukur. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Indikator kinerja

---

<sup>5</sup> Sudari, Kakung Achmad. *Kinerja Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2017*

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator kinerja keuangan yaitu masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak.<sup>6</sup>

Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan dan tata kelola yang baik dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta keistimewaan dan keanekaragaman daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan hal pengelolaan keuangan daerah, maka analisis terhadap kinerja keuangan daerah dapat memberikan informasi penting guna menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta dapat digunakan untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. bentuk atau output dari penilaian kinerja daerah adalah berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur

---

<sup>6</sup> Saputra, Sandy Candra, dkk. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana*, Jurnal Manajemen, Vol.4, 2018, No.2, Hal.138

laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah yang berupa perhitungan APBD.<sup>7</sup>

Rasio keuangan adalah laporan keuangan yang merupakan cermin dari prestasi manajemen pada suatu periode tertentu. Dengan melihat laporan keuangan tersebut kita dapat melihat bagaimanakah prestasi manajemen tersebut pada periode tertentu. Informasi dan gambaran perkembangan keuangan perusahaan bisa diperoleh dengan menggandakan interpretasi dari laporan keuangan, yakni dengan menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan seperti elemen-elemen dari berbagai aktiva satu dengan lainnya, elemen-elemen passive dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Undang-undang No.17 Tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan adanya dukungan suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Pada dasarnya anggaran kinerja merupakan pembangunan suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.<sup>9</sup>

Kinerja keuangan adalah pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja seseorang atau organisasi

---

<sup>7</sup> Sudari, *Kinerja Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2017*

<sup>8</sup> Sutrisno, *Analisis Rasio Keuangan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)

<sup>9</sup> Sudari, Kakung Achmad. *Kinerja Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-201*

secara sederhana dapat dikatakan baik apabila yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila pencapaian melebihi target, maka kinerja dapat dikatakan sangat baik, sedangkan apabila lebih rendah dari target maka dikatakan bahwa kinerjanya buruk.<sup>10</sup> Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Fahmi dan Irham, “*Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: Alfabeta)

<sup>11</sup> Hamid, A, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka Jawa Barat*, Jurnal Sekuritas 1(4): 38-51, 2018

<sup>12</sup> Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Hal.126

Analisis rasio keuangan pada APBD bisa dipakai sebagai tolak ukur dinilainya kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah, efektivitas realisasi pendapatan daerah dan mengukur tingkat efisiensi belanja, jadi salah satu alat ukur yang dapat dipakai untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan daerah yang dihasilkan dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam mengelola keuangan.<sup>13</sup>

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.<sup>14</sup> Menurut Wahyudi dan Eva dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah diantaranya adalah dengan menghitung rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>15</sup>

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan besarnya campur tangan

---

<sup>13</sup> Setianingrum, Rizqi Dwi, Haryanto, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Diponegoro Pournal Of Accounting*, Vol.9, No.2, Hal.2, 2020

<sup>14</sup> Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Hal..128

<sup>15</sup> Wahyudi, Muhammad, Wulandari Eva, *Kinerja Keuangan pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus pemereintah Daerah Kota Magelan*, Vol.2, No.2, 2017, Hal.26

pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.<sup>16</sup>

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.<sup>17</sup> Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan targe yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen.

---

<sup>16</sup> Purba, S. dan R.C. Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten Dairi*, Jurnal Ilmiah Kohesi 1 (1) : 228-240, 2017

<sup>17</sup> Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Hal.128

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.<sup>18</sup>

Analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya antara lain dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yaitu analisis pendapatan daerah, analisis belanja daerah, dan analisis pembiayaan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaanuang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam

---

<sup>18</sup> Amin, Nurul, *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita), 2019, Hal. 83-84

satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah

terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan**  
**Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021**

*(dalam Rupiah)*

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	%
<b>I. Pendapatan</b>	<b>2.615.259.162.182,00</b>	<b>3.095.975.320.366,44</b>	<b>118,38</b>
I.1. Pendapatan Asli Daerah	578.186.643.535,00	953.892.026.423,44	164,98
I.2. Pendapatan Transfer	1.945.473.488.647,00	2.051.224.047.043,00	105,44
I.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.599.030.000,00	90.859.246.900,00	99,19
<b>II. Belanja</b>	<b>3.054.038.942.585,00</b>	<b>2.753.992.368.427,47</b>	<b>90,18</b>
II.1. Belanja Operasi	2.295.255.524.857,00	2.064.101.812.477,69	89,93
II.2. Belanja Modal	343.177.469.878,00	288.291.855.548,78	84,01
II.3. Belanja Tidak Terduga	28.442.314.500,00	17.151.113.610,00	60,30
II.4. Transfer	387.163.633.350,00	384.447.586.791,00	99,30
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(438.779.780.403,00)</b>	<b>341.982.951.938,97</b>	
<b>III. Pembiayaan</b>	<b>438.779.780.403,00</b>	<b>440.279.780.403,41</b>	<b>100,34</b>
III.1. Penerimaan Pembiayaan	447.279.780.403,00	447.279.780.403,41	100,00
III.2. Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000,00	7.000.000.000,00	82,35
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>782.262.732.342,38</b>	

Sumber: [bpkad.tulungagung.go.id](http://bpkad.tulungagung.go.id)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2021 menyatakan bahwa pencapaian keuangan ini dikatakan lambat, ini tidak terlepas dari penurunan aktivitas ekonomi yang mempengaruhi realisasi beberapa unsur pendapatan asli daerah, diantaranya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2021 mengalami penurunan daripada realisasi tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan karena pembatalan kegiatan oleh masyarakat karena adanya pandemic yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. sedangkan pada penyerapan belanja, kegiatan belanja operasi dan modal adalah yang

paling terdampak. Penyerapan pada tahun anggaran 2021 kurang dari pagu anggaran yang ditetapkan, hal ini disebabkan salah satunya karena ditundanya proyek pemerintah akibat refocusing untuk dana penanganan pandemic.

Penelitian yang dilakukan oleh Adib menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih rendah, dimana ketergantungan kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar. Tingkat pertumbuhan juga relative kecil dan tingkat keserasian juga masih timpang, dimana rasio belanja modal masih sangat kecil dibandingkan dengan rasio belanja rutin. Adapun tingkat efektivitas sangat tinggi dan tingkat efisiensi adalah cukup efisien.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Leli menganalisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015 mempunyai kecenderungan naik di dalam rasio pemerintah pada tahun 2015. Kinerja pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan belum baik, apabila seluruh kegiatan yang direncanakan telah terlaksana, ini menunjukkan telah terjadinya pengendalian belum baik oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sedangkan kinerja keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dilihat dari analisis varian pendapatan daerah sangat efektif.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Widigdo, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung*, Laporan Analisis BPKAD Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021

<sup>20</sup> Ekasari, Leli, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018

Penelitian yang dilakukan oleh Adiyatma menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan hasil penelitian diketahui bahwa tahun 2014 pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan proses desentralisasi daerah sebesar 13,2% dengan sisa 86,8% yang menunjukkan pemerintah masih belum maksimal dalam menjalankan proses desentralisasi daerah, begitu pula dengan tahun lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah provinsi masih sangat mendominasi dalam pendanaan. Tingkat kemandirian pemerintah daerah, sehingga dapat diartikan masih dibutuhkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.<sup>21</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji bagaimana kinerja keuangan daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonom daerah. Penelitian yang dilakukan sebelumnya

---

<sup>21</sup> Admaja, Adityama, dkk, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2018*, Journal of Regional Economics Indonesia, 2(2), 2021

menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Tulungagung telah terjadinya pengendalian yang belum baik. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk beberapa tahun terakhir ini karena penambahan APBD.

2. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Namun, penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki masalah pada manajemen keuangan dan kesinambungan fiskal daerah yang tidak lancar. Kinerja pendapatan daerah yang besar masih kurang dapat memaksimalkan belanja daerah karena pada belanja langsung dan belanja tidak langsung masih kurang memaksimalkan belanja langsung yang berkaitan dengan aktivitas Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan.
3. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Namun, Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih rendah, dimana ketergantungan kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar. Tingkat pertumbuhan juga relative kecil dan tingkat keserasian juga masih timpang. Selain itu Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2021 mengalami penurunan

daripada realisasi tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan.

4. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. penyerapan belanja pada tahun anggaran 2021 kurang dari pagu anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan.
5. Diperlukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah atas pencapaian dari pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu sebagai evaluasi berkala dan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2020-2023.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teori dalam pengembangan teoritis maupun praktis yang berkaitan dalam memecahkan permasalahan secara actual. Berikut ini manfaat dari penelitian:

##### **a. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mampu memberikan wawasan bagi para pembaca, selain itu agar mampu dijadikan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat menambah wawasan mengenai kinerja keuangan khususnya dalam manajemen keuangan.

##### **b. Kegunaan praktis**

###### **1) Bagi pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja serta diharapkan dapat bermanfaat

untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah.

## 2) Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan mengenai pengambilan kebijaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang. Terutama untuk memberikan tambahan informasi, masukan, dan menyampaikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi FEBI UIN Sayyid Ali Rrahmatullah Tulungagung

## 3) Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk mendukung penelitian selanjutnya dalam hal belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, agar lebih efektif serta efisien sehingga peneliti dapat memisahkan aspek tertentu dengan objek yang diteliti. Sedangkan batasan masalah adalah upaya untuk menetapkan ruang lingkup penelitian. Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi factor apa saja yang termasuk ruang lingkup masalah serta apa saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi tersebut peneliti memberi batasan

masalah yang diteliti agar lebih spesifik yaitu mengenai tiga variabel pengelolaan kinerja keuangan.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Kabupaten Tulungagung pada periode anggaran Tahun 2020-2023. Variabel bebas dalam penelitian adalah dengan menggunakan rasio keuangan APBD yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Tulungagung.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang ada pada website BPKAD dan Badan Pusat Statistik. Kemudian bagi peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan jaringan dalam melakukan penelitian.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap variabel-variabel dimana telah dilakukan penelitian sebagai bahan penafsiran terhadap judul penelitian.

#### a. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonom

daerah.<sup>22</sup> kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan.<sup>23</sup>

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

c. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

d. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

e. Pembiayaan Daerah

---

<sup>22</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara)

<sup>23</sup> Fahmi dan Irham, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: Alfabeta)

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dana atau memanfaatkan surplus anggaran.

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian “Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung” dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD dengan menggunakan rasio keuangan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2023.

## H. Sistematika Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi yang saya buat ada 6 (enam) bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dari masalah penelitian tersebut, tujuan dari penelitian, kegunaannya, ruang lingkup serta keterbatasan penelitian dan juga definisi operasional. Pada bab I menjelaskan tentang garis besar dan pembahasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan kerangka teori yang digunakan untuk memperkuat pokok permasalahan yang akan diteliti dan dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk membahas objek penelitian ini. Bab ini juga membahas suatu kajian penelitian terdahulu. Fungsinya untuk dijadikan sebagai jawaban sementara dan juga digunakan untuk membandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini mengkaji mengenai pendekatan dan juga jenis yang digunakan penelitian untuk menggali informasi dan juga solusi pemecahannya, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, dan teknik yang digunakan dalam analisis suatu data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini digunakan untuk menganalisis dari bab III, sehingga diketahui hasil penelitian berupa adanya hasil pengukuran objek yang telah hitung.

### **BAB V HASIL PEMBAHASAN**

Pada bab ini memaparkan tentang hasil dari rumusan masalah dalam penelitian yaitu analisis kinerja pengelolaan pendapatan daerah, analisis belanja daerah, dan analisis pembiayaan daerah dalam kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2020-2023. Serta bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian membandingkannya dengan teori ataupun dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan jugasaran terkait dengan hasil pembahasan dan juga hasil penelitian.

Bagian akhir laporan ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.